

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sejak lama menempati posisi penting sebagai penopang utama perekonomian nasional. Perannya tidak hanya terlihat dari jumlah yang begitu besar, tetapi juga dari kontribusi nyata yang diberikan dalam menjaga keberlangsungan dan ketahanan ekonomi masyarakat (Baginda C L S et al., 2024). Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan sumbangan lebih dari 60% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sementara kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja berada di kisaran 97% dari total angkatan kerja formal. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya daya serap UMKM dalam menyediakan lapangan pekerjaan sekaligus menopang daya beli masyarakat. Namun, peran besar tersebut tidak serta merta membuat UMKM terhindar dari tantangan (Jee Sinha et al., 2024).

Globalisasi, dinamika, dan kemajuan teknologi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi UMKM agar tetap relevan dan kompetitif. Menyadari hal tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah memberikan perhatian besar terhadap program digitalisasi UMKM sebagai langkah percepatan, mulai dari modernisasi cara pemasaran hingga penggunaan sistem pembayaran yang lebih praktis. Transformasi digital ini sudah tidak dapat dihindari, sebab pola transaksi antara konsumen dan produsen kini bergeser signifikan seiring

meningkatnya pemanfaatan internet dan smartphone. Pergeseran ini sekaligus menegaskan perlunya pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang membentuk perilaku keuangan (*financial behavior*) serta penggunaan sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Kedua aspek tersebut menjadi kunci utama dalam memperkuat kinerja keuangan UMKM. Apabila dapat dikelola secara tepat, hal ini akan membuat UMKM lebih tangguh serta mampu menjaga keberlanjutan usaha meski dihadapkan pada guncangan ekonomi (Chairunnisa et al., 2020).

Financial behavior dalam konteks UMKM merujuk pada pola sikap, kebiasaan, dan keputusan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya keuangan mereka. Praktik tersebut meliputi penyusunan anggaran yang terencana, kebiasaan menabung secara konsisten, pengelolaan utang dengan bijak, pemantauan arus kas, hingga pengambilan keputusan bisnis yang didasarkan pada informasi keuangan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku keuangan yang baik dapat membantu pelaku usaha mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan, menghindari pemborosan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Sebaliknya, perilaku keuangan yang kurang baik akan menyebabkan inefisiensi, pemborosan biaya, bahkan kesulitan arus kas yang bisa mengancam kelangsungan usaha (Almira et al., 2023).

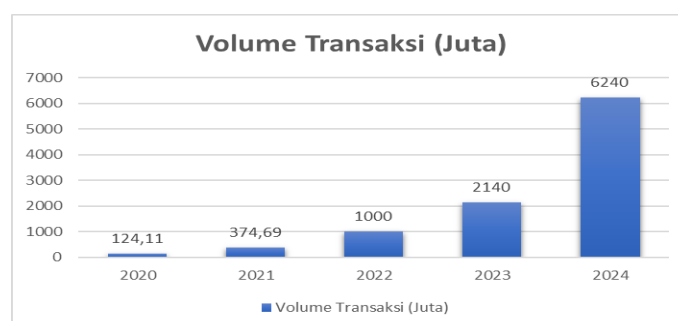
Perkembangan teknologi yang kian pesat pada era digital saat ini telah menghadirkan kemajuan signifikan dalam sistem pembayaran di berbagai sektor, termasuk sektor publik, mikro, kecil, hingga menengah (Riana et al.,

2024). Salah satu inovasi penting di bidang tersebut adalah penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang dirancang oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menyatukan seluruh metode pembayaran nontunai ke dalam satu standar nasional. QRIS dikembangkan sebagai sarana untuk memudahkan transaksi secara digital, meningkatkan efektivitas pembayaran, mempercepat perluasan inklusi keuangan, serta meminimalkan ketergantungan masyarakat pada penggunaan uang tunai (Kusnandar et al., 2024). Melalui sistem ini, seluruh aplikasi pembayaran, baik milik bank maupun nonbank, dapat digunakan di berbagai merchant berlogo QRIS seperti toko, warung, tempat wisata, hingga layanan donasi tanpa terhalang perbedaan penyedia layanan (Leatemia et al., 2023). Kemudahan akses dan fitur yang praktis menjadikan QRIS semakin diminati oleh pelaku usaha, khususnya UMKM, karena tidak hanya mempercepat proses transaksi tetapi juga mendukung pencatatan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Dengan demikian, penggunaan QRIS menjadi bentuk adaptasi strategis pelaku UMKM terhadap perkembangan ekonomi digital sekaligus sarana untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja keuangan secara berkelanjutan (Fitriyah et al., 2024).

Kinerja keuangan UMKM dapat dipahami sebagai kemampuan usaha dalam mencapai hasil yang optimal melalui pengelolaan sumber daya keuangan. Indikator kinerja keuangan umumnya diukur dari aspek laba bersih, penjualan, serta aset yang dimiliki. Dalam konteks UMKM, peningkatan penjualan dan stabilitas arus kas menjadi ukuran utama yang mencerminkan

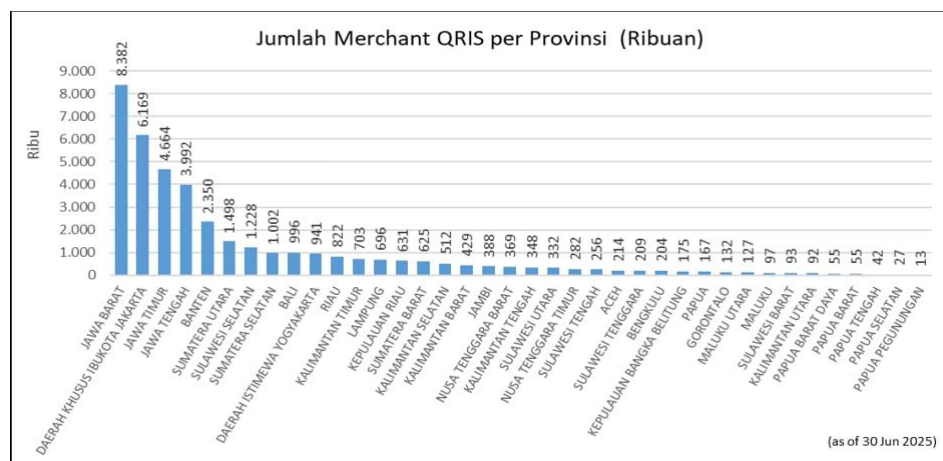
keberhasilan usaha dalam mempertahankan keberlanjutan dan daya saing. Kinerja keuangan yang baik tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan usaha, tetapi juga mendukung penciptaan lapangan kerja serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah (Supriatna et al., 2023).

Perkembangan pesat transaksi digital di Indonesia tidak hanya mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kinerja keuangan UMKM (Nurjannah et al., 2022). Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, penggunaan QRIS menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan semakin meluasnya adopsi pembayaran digital di berbagai sektor ekonomi. Berdasarkan data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI, 2024), volume transaksi QRIS meningkat tajam dari 124,11 juta transaksi pada tahun 2020 menjadi 6.240 juta transaksi pada tahun 2024. Lonjakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha semakin terbiasa melakukan transaksi non-tunai berbasis digital yang lebih praktis dan efisien, sekaligus menegaskan peran QRIS sebagai pendorong utama percepatan transformasi ekonomi digital di Indonesia.



Gambar 1. 1 Data Volume Transaksi Penggunaan QRIS 2020-2024
(Sumber: ASPI)

Pertumbuhan penggunaan QRIS secara nasional membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar. Konsumen kini semakin memilih usaha yang menyediakan opsi pembayaran digital karena dianggap lebih praktis dan efisien. Melalui transaksi digital yang berlangsung secara real-time, pelaku usaha dapat mempercepat arus kas, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat modal kerja. Dengan demikian, digitalisasi pembayaran bukan hanya menjadi tren, melainkan telah berkembang menjadi alat strategis yang berperan penting dalam meningkatkan likuiditas, memperkuat daya saing, dan pertumbuhan usaha kecil. Meskipun demikian, tantangan berupa biaya administrasi transaksi digital tetap perlu diperhatikan oleh UMKM berskala mikro agar tidak mengurangi margin keuntungan (Fahmi & Aswat, 2024).



Gambar 1. 2 Jumlah Merchant QRIS per Provinsi (Ribuan)
(Sumber: ASPI)

Berdasarkan Gambar 1.2, Jawa Timur menempati posisi ketiga dengan jumlah merchant QRIS sebanyak 4.664 ribu, menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi di kalangan pelaku UMKM di wilayah tersebut. Kondisi ini

mencerminkan bahwa Jawa Timur telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekosistem keuangan digital di Indonesia. Namun, di tingkat adopsi QRIS antarwilayah di Jawa Timur masih belum merata. Tidak semua kabupaten memiliki tingkat pemanfaatan QRIS yang merata, yang dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur digital, tingkat literasi keuangan masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah (Saputra & Febrian, 2025).

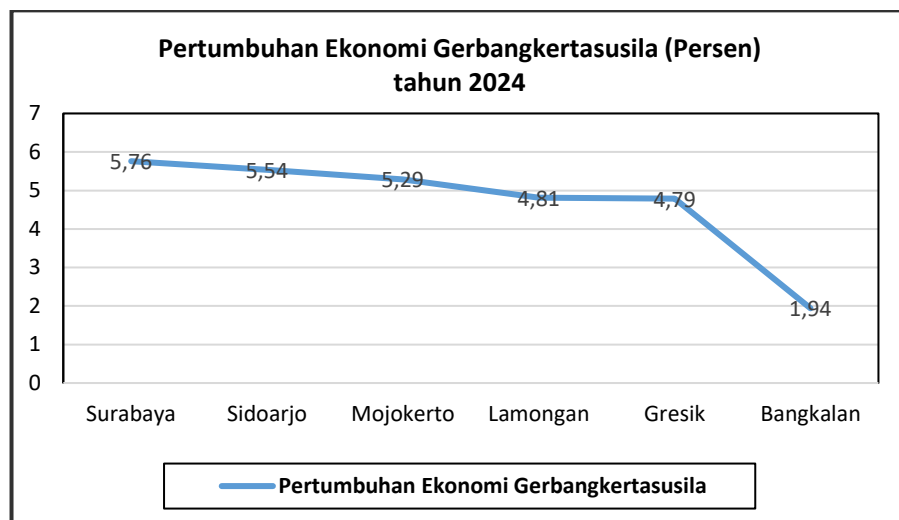
Dalam konteks tersebut, *financial behavior* menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan dan stabilitas usaha, khususnya bagi para pelaku UMKM yang mulai menyesuaikan diri dan beralih menggunakan mekanisme pembayaran berbasis digital. Praktik seperti pengelolaan arus kas yang disiplin, pemisahan rekening usaha dan pribadi, serta pengelolaan utang yang bijak terbukti mampu memperkuat kinerja keuangan. Ketika perilaku keuangan yang baik dipadukan dengan penggunaan QRIS, maka proses transaksi menjadi lebih akurat, arus kas lebih lancar, serta pendapatan usaha dapat dipantau secara transparan dan real-time. Sebaliknya, tanpa perilaku keuangan yang baik, data digital dari transaksi non-tunai tidak akan dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan keuangan maupun akses pembiayaan. Namun, penerapan perilaku keuangan yang sehat dan penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS masih menghadapi berbagai tantangan di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Bangkalan, yang memiliki dinamika sosial-ekonomi khas di wilayah Madura (Sesa et al., 2025).

Pembangunan Jembatan Suramadu menjadi salah satu infrastruktur paling dominan yang membawa pengaruh besar terhadap dinamika perekonomian

Kabupaten Bangkalan. Jembatan sepanjang 5,4 kilometer yang menghubungkan Pulau Jawa (Kota Surabaya) dengan Pulau Madura melalui Kabupaten Bangkalan ini diresmikan pada 10 Juni 2009 sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya mempercepat mobilitas penduduk dan distribusi barang, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Madura (Ainurrofiah et al., 2024). Sebagai pintu gerbang utama Pulau Madura, Bangkalan menempati posisi strategis dalam kawasan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) yang berperan penting dalam mendukung integrasi ekonomi antara Jawa Timur bagian barat dan Madura. Dengan posisi tersebut, Suramadu diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya investasi, perdagangan, dan kegiatan ekonomi baru di wilayah Bangkalan serta mendorong pemerataan pembangunan di kawasan sekitarnya (Pratama et al., 2019).

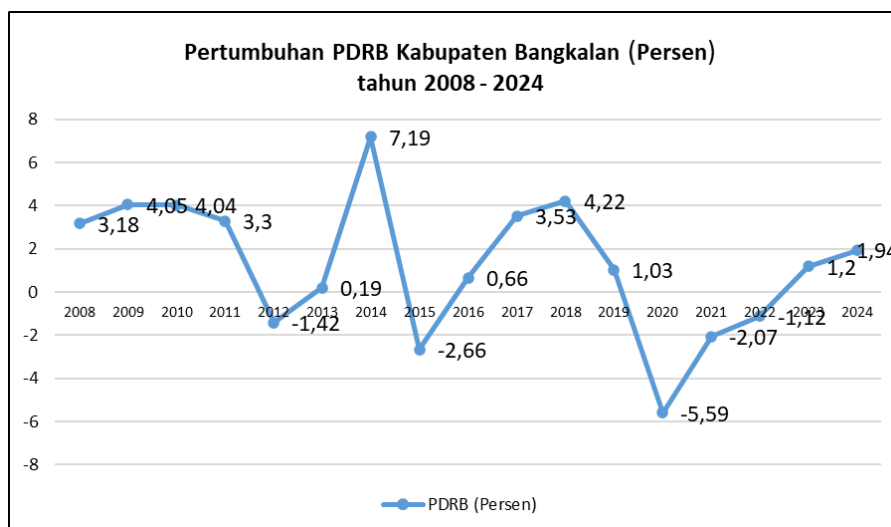
Sebagai kawasan metropolitan strategis, Gerbangkertasusila berperan sebagai salah satu kekuatan utama yang mendukung dan menopang perekonomian di Provinsi Jawa Timur karena perannya dalam aktivitas industri, perdagangan, dan jasa. Namun, kontribusi ekonomi antarwilayah di dalam kawasan ini tidak merata. Daerah inti seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, dan Gresik menunjukkan kinerja ekonomi yang jauh lebih tinggi, sementara Bangkalan justru berada pada posisi terendah dalam kawasan tersebut (Taufiqurrachman & Jayadi, 2023). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun Bangkalan memiliki posisi strategis dan akses langsung melalui Jembatan Suramadu, pemanfaatan potensi ekonominya

belum optimal. Kondisi ini menjadi salah satu alasan penting untuk mengkaji lebih dalam dinamika ekonomi Bangkalan, termasuk bagaimana pelaku usaha dan UMKM merespons perubahan aksesibilitas dan perkembangan digital.



Gambar 1. 3 Pertumbuhan Ekonomi Gerbangkertasusila 2024
Sumber: BPS

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa Bangkalan memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah di antara seluruh wilayah dalam Gerbangkertasusila. Perbedaan signifikan ini memperlihatkan bahwa Bangkalan belum mampu mengikuti dinamika pertumbuhan kawasan meskipun memiliki posisi strategis dan konektivitas langsung melalui Jembatan Suramadu. Fakta ini memperkuat pentingnya mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan ekonomi daerah, termasuk kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi dan peluang digital.



Gambar 1. 4 Pertumbuhan PDRB Kab.Bangkalan 2008-2024
Sumber: BPS Kab.Bangkalan

Mengacu pada informasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dinamika pertumbuhan perekonomian Bangkalan menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antara periode sebelum dan sesudah beroperasinya Jembatan Suramadu. Sebelum Suramadu diresmikan, laju pertumbuhan ekonomi Bangkalan cenderung stabil dengan peningkatan yang moderat, yaitu 3,18% pada 2008, 4,05% pada 2009, dan 4,04% pada 2010. Kondisi ini menggambarkan bahwa perekonomian Bangkalan masih bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lokal yang tumbuh perlahan karena terbatasnya akses transportasi serta infrastruktur ekonomi (Astuti & Hidayat, 2021). Namun, setelah Suramadu beroperasi pada tahun 2009, pola pertumbuhan ekonomi Bangkalan mulai menunjukkan fluktuasi yang lebih besar. Pada 2011–2012, perekonomian justru mengalami penurunan karena masyarakat dan pelaku usaha lokal belum siap memanfaatkan peluang ekonomi baru dari terbukanya jalur transportasi ke Surabaya (Megasari, 2014).

Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2014, ketika pertumbuhan ekonomi Bangkalan mencapai 7,19%, yang merupakan capaian tertinggi dalam dua dekade terakhir. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan pembangunan di sekitar kawasan Suramadu, perluasan sarana perdagangan, serta bertambahnya pengeluaran konsumsi masyarakat. Namun, pada tahun 2015, pertumbuhan kembali menurun menjadi -2,66% karena proyek-proyek pembangunan tersebut mulai berakhir dan belum ada kegiatan ekonomi baru yang mampu menggantikan sumber pertumbuhan sebelumnya (N. K. Sari et al., 2020).

Pada periode 2016–2019, pertumbuhan ekonomi Bangkalan berfluktuasi antara 0,66% hingga 4,22%, mencerminkan adanya pemulihan yang belum sepenuhnya stabil. Situasi tersebut terjadi karena keterbatasan kualitas serta ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki serta kemampuan pelaku usaha lokal dalam meningkatkan daya saing (Hasul & Jayanti, 2019). Selanjutnya, pada masa pandemi COVID-19 (2020–2022), perekonomian Bangkalan kembali melemah karena aktivitas perdagangan, jasa, dan konsumsi masyarakat menurun drastis. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi tercatat -5,59% pada 2020, -2,07% pada 2021, dan -1,22% pada 2022 (BPS Bangkalan, 2024). Setelah pandemi mereda, perekonomian daerah mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 1,20% pada 2023 dan 1,94% pada 2024, seiring meningkatnya kembali kegiatan perdagangan, penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS, serta bertambahnya pelaku UMKM yang beradaptasi dengan teknologi keuangan (Nur Amalia & Akbar Budiman, 2024).

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Jembatan Suramadu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, meskipun pertumbuhannya belum stabil dalam jangka panjang. Menurut (Hasul & Jayanti, 2019) mengungkapkan bahwa manfaat ekonomi Suramadu lebih banyak dirasakan oleh wilayah inti seperti Surabaya dibandingkan Bangkalan. Laporan BPS Jawa Timur (2024) juga menegaskan bahwa kontribusi ekonomi Bangkalan di antara wilayah Gerbangkertasusila masih yang terendah, menunjukkan adanya kesenjangan pemanfaatan peluang ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur besar seperti Suramadu perlu diimbangi dengan strategi penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta transformasi digital melalui pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS agar pelaku UMKM di Bangkalan dapat berperan aktif dalam memperkuat perekonomian daerah secara inklusif, stabil, dan berkelanjutan (Taufiqurrachman & Jayadi, 2023). Dalam konteks tersebut, kondisi sosial-ekonomi di Kabupaten Bangkalan menjadi relevan untuk dikaji karena wilayah ini memiliki tantangan sekaligus potensi besar bagi pengembangan sektor UMKM, termasuk peran lembaga pendidikan tinggi yang mendorong aktivitas ekonomi lokal dan inovasi digital.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara perilaku keuangan, penggunaan teknologi digital, dan kinerja UMKM. Hasil penelitian (H. N. Sari & Hadyarti, 2024) menunjukkan bahwa *financial capital*, *financial technology*, dan *financial behavior* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Namun, temuan ini berbeda dengan (Fitria et al.,

2021) yang menemukan bahwa sikap keuangan terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kinerja UMKM, sedangkan literasi keuangan dan perilaku keuangan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian (Wahyudin et al., 2022) juga menjelaskan bahwa pemanfaatan platform e-commerce dan QRIS memberikan pengaruh yang membawa dampak positif terhadap peningkatan tingkat penjualan dan daya saing UMKM di Belitung. Hasil serupa disampaikan oleh (Angelicia et al., 2024) yang menemukan bahwa implementasi QRIS dan kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Namun, faktor seperti literasi penggunaan QRIS, kenyamanan, dan biaya layanan tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap hasil usaha.

Penelitian mengenai *financial behavior* dan penggunaan QRIS pada UMKM telah banyak dilakukan, namun hasilnya masih memperlihatkan temuan yang belum konsisten. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perilaku keuangan serta pemanfaatan QRIS memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM, sementara penelitian lain menemukan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di wilayah dengan tingkat literasi keuangan dan digital yang relatif tinggi, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi UMKM di daerah dengan tingkat adopsi teknologi yang masih terbatas, seperti Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji secara simultan pengaruh *financial behavior* dan penggunaan

QRIS terhadap kinerja keuangan UMKM pada konteks daerah non-metropolitan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan kajian mengenai hubungan antara *financial behavior* dan penggunaan QRIS terhadap kinerja keuangan UMKM, khususnya di Kabupaten Bangkalan Madura. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perilaku keuangan dan penerapan teknologi pembayaran digital dapat berperan dalam memperkuat ketahanan serta kinerja keuangan pelaku UMKM. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan dan menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha dalam mempercepat transformasi digital serta mendorong keberlanjutan ekonomi di wilayah Madura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai fenomena serta latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Apakah *financial behavior* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah penggunaan QRIS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Bangkalan?
3. Apakah *financial behavior* dan penggunaan QRIS berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif *financial behavior* terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif penggunaan QRIS terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan antara *financial behavior* dan penggunaan QRIS terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen, terutama dalam bidang kajian keuangan dan perilaku UMKM. Integrasi antara variabel *financial behavior* dan penggunaan QRIS menawarkan perspektif baru dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan UMKM di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang berminat menelusuri keterkaitan antara perilaku keuangan, teknologi keuangan, dan kinerja usaha dalam konteks transformasi digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi pelaku UMKM sebagai pedoman dalam mengelola keuangan secara lebih efektif serta memanfaatkan QRIS sebagai alat pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja usaha. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang mendorong peningkatan literasi keuangan, adopsi teknologi digital, dan pemerataan infrastruktur pembayaran non-tunai. Selain itu, bagi lembaga keuangan dan penyedia layanan pembayaran digital, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai peluang dan tantangan dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi seperti Kabupaten Bangkalan.